

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini peneliti akan menjelaskan garis besar dalam penelitian ini. Hal-hal yang akan dimuat dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat serta tujuan dan manfaat dari penelitian mengenai penggalian dari data ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada publik atau masyarakat, untuk itu partisipasi masyarakat didalam penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan dalam mendukung program sekolah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8 menyebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan” dilanjutkan dengan pasal 9 yang menyatakan “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”

Masyarakat akan mendukung program sekolah apabila sekolah mampu menyelenggarakan manajemen pendidikan yang transparan, terutama transparansi dalam hal manajemen keuangan. Hal ini diperkuat dalam undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.” Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Untuk itu kepala sekolah dituntut untuk bisa menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas, efektif dan komprehensif.

Undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Namun disini terdapat salah satu masalah fundamental dalam sistem pendidikan nasional yakni sulitnya untuk memperoleh informasi terkait keuangan sekolah yang

terstandarisasi. Untuk itu penerapan manajemen keuangan sekolah harus dibenahi mulai dari cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan sekolah yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum.

Menurut Nanang Fattah dalam buku Mulyono (2010) menyatakan bahwa:

Keuangan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan (*mobile*), pengadaan alat-alat, dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstra, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (resiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya.

Proses manajemen keuangan sekolah berlandaskan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui :

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlelanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
4. Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk aktivitas pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, serta aktivitas pembiayaan operasional sekolah. Aktivitas-aktivitas sekolah tersebut akan

terganggu apabila tidak didukung dengan anggaran pendidikan yang memadai. Semakin besar anggaran pendidikan, maka diperkirakan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengelolaan manajemen keuangan yang baik bagi penyelenggara pendidikan perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Hal ini lah yang harus diselesaikan oleh penanggung jawab tertinggi dalam suatu lembaga pendidikan yakni kepala sekolah untuk mencapai dan memanfaatkan berbagai sumber dana yang dibutuhkan sesuai rencana yang sudah di ajukan. Karena tidak bisa dipungkiri pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan kegiatan yang gaenecukup banyak, sementara sumber dana yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu perencanaan keuangan diawal tahun ajaran baru yang di muat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran yang ada, agar dapat selalu menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa antara sekolah negeri dengan sekolah swasta belum berimbang. Selama ini, jika sekolah negeri kekurangan dana karena pasokan dana dari Pemerintah sangat terbatas, kepala sekolah negeri cenderung menunggu alokasi dana berikutnya dari Pemerintah dari pada melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dana.

Demikian halnya dengan sekolah swasta, karena adanya keterbatasan dana pasokan dari pemerintah, kepala sekolah swasta berinisiatif mengatasinya dengan cara meminta dana dari yayasan pendidikan atau sumber dana non pemerintah. Meskipun kepala sekolah swasta dapat meminta dana selain dari pemerintah, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menanggung risiko atas kebijakan yang diambilnya karena mereka takut mendapat tuduhan negatif karena melakukan tindakan ilegal. Kecukupan sumber, mutu proses belajar

mengajar dan mutu keluaran akandapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan tersedia dan biayatersebut dikelola secara profesional.

Dengan adanya permasalahan tersebut, para penyelenggara pendidikan berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun upaya tersebut memerlukan biaya yang besar. Dengan demikian, pendidikan yang mahal bukan secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. Itu berarti bahwa sistem biaya pendidikan merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah serta merupakan salah satu unsur penentu terwujudnya kualitas pendidikan.

Yayasan Perguruan Al-Islam merupakan salah satu yayasan pendidikan formal yang berciri khas islam yang sangat terpendang di Surakarta dengan memiliki banyak lembaga pendidikan dibawahnya, salah satu lembaga yang menarik bagi penulis yakni Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakartaberdasarkan pengamatan sementara, MA Al-Islam Jamsaren Surakarta mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jumlah siswa berprestasi dalam berbagai bidang, baik pengetahuan, keterampilan, olahraga dan masih banyak lagi dan jika dilihat dari segi bangunan, madrasah yang berdiri kokoh di Komplek Pondok Pesantren Jamsaren ini berdiri kokoh dengan 3 lantai sebagai tempat untuk proses belajar dan mengajar yang nyaman dan disertai dengan fasilitas yang menunjang kegiatan guru maupun siswa. Terkait dengan manajemen keuangan, MA Al-Islam Jamsaren Surakarta secara mandiri mengatur dan mengelola dana baik dana yang masuk maupun keluar dengan cukup baik, dimana setiap bulannya selalu ada kendali dan kontrol secara langsung oleh pihak yayasan.

Melihat masih banyaknya minat masyarakat yang menginginkan anaknya mengenyam pendidikan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta dengan biaya yang tidak murah, sebagaimana sudah dipaparkan diatas bahwa biaya yang tinggi belum mampu menjamin kualitas pendidikan, penulis berusaha menyusun lebih jauh tentang manajemen keuangan terutama yang dilaksanakan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta dan ada tidaknya pengaruh yang dihasilkan ke kualiatas

pendidikan yang ada. Berdasarkan pemaparan diatas mengenai masalah manajemen keuangan sekolah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dan Implikasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dibuat dengan tujuan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus pada masalah yang akan diteliti sehingga penulisannya tidak menyebar kemana-mana. Setelah melihat latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan manajemen keuangan sekolah di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 ?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen keuangan dalam meningkatkan kualitas di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2016/2017?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan implementasi manajemen keuangan sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses perencanaan manajemen keuangan sekolah di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2016/2017
2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan manajemen keuangan sekolah dalam meningkatkan kualitas di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan implementasi manajemen keuangan sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh gambaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai implementasi manajemen keuangan sekolah.

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja bidang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan

3. Bagi Yayasan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja bidang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan

4. Bagi peneliti lain

Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam kajian yang sama atau dengan metode yang sama dan diharapkan bisa menjadi bahan kajian teoritis bagi akademisi terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan.

Demikian bab pendahuluan dapat penulis paparkan seperti diatas, selanjutnya penulis akan menjabarkan beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya yaitu bab kajian teori.